

**Analisis Dampak Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Sekolah
Menengah Pertama 3 Semarang (Kajian Peraturan Kepala Dinas
Pendidikan Kota Semarang 420/3271 Tentang Petunjuk Teknis
Penerimaan Peserta Didik Reguler Di Kota Semarang 2010/2011)**

Oleh :

Pandu Pratomo, Sri Suwitri, Ari Subowo

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The problem admission process in SMP 3 Semarang was always about the achievement scores of the prospective students that applied to SMP 3 Semarang. This problem is getting worst and more complex by years, so SMP 3 Semarang is trying to prevent it by making a policy that oblige all prospective students that want to apply to SMP 3 Semarang by using the achievement scores to undergo the achievement scores test done by the school admission committee and oblige to sign a stamped statement that acknowledge the truth of their achievement scores as well. This research aims to identify and analyze the policy impact of school admission policy made by SMP 3 Semarang and to find out all the supporting and impeding aspects during the policy implementation/practice.

The research uses descriptive qualitative. In conclusion The research showed that this policy that have been made by SMP 3 Semarang have both internal and external effects, in the form of positive responds giving by public and the Education Board itself already fully support as well the policy that oblige all prospective students that want to apply by using the achievement scores must undergo the achievement scores test done by the school admission committee and oblige to sign a stamped statement that acknowledge the truth of their achievement scores. This policy is having effect on SMP 3 Semarang as well in the form of the descent rate of fraud in the school admission process in SMP 3 Semarang, so the school quality is maintained

Keyword : Analysis of Impact, Internal Impact, External Impact, School Admission

A. Latar Belakang

Selama beberapa tahun belakangan ini masalah yang terjadi dalam penerimaan peserta didik

khususnya di Kota Semarang begitu kompleks mulai dari adanya masalah seleksi khusus, sistem rayonisasi, sampai

dengan masalah penggunaan nilai sering dibicarakan. Dari sekian banyak masalah penerimaan peserta didik diatas masalah penggunaan nilai prestasi merupakan masalah yang sering dihadapi sekolah-sekolah, dan khususnya menjadi masalah besar bagi sebuah sekolah unggulan seperti SMP 3 Semarang. Karena merupakan sekolah unggulan, maka praktik manipulasi pun semakin banyak terjadi, dibandingkan dengan sekolah yang bukan unggulan. Bagi sekolah unggulan, dampak masalah ini begitu kompleks karena dapat menurunkan mutu sekolah. Mutu bagi sebuah sekolah unggulan merupakan salah satu elemen penting yang harus selalu dijaga sehingga jangan sampai dalam proses penerimaan inputnya terdapat manipulasi-manipulasi yang berpengaruh terhadap kualitas input calon siswa didik.

Berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 420/3721 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Reguler Tahun Pelajaran 2010/2011, seleksi penerimaan peserta didik SMP menggunakan nilai ujian akhir (UASBN) SD sebagai komponen utama, dan komponen tambahan berupa nilai kemaslahatan, nilai lingkungan, dan nilai prestasi. Hal ini diperjelas juga pada Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 420/3721 tentang Petunjuk

Teknis Penerimaan Peserta Didik Reguler pada pasal 21 Bab IX tentang nilai prestasi. Komponen-komponen tambahan inilah yang menjadi masalah dalam penerimaan peserta didik dari tahun ke tahun, karena pada umumnya para orang tua calon peserta didik yang nilai UASBN-nya belum memenuhi syarat selalu berusaha untuk mendapatkan nilai tambahan dengan memanfaatkan jalur komponen nilai tambahan agar anaknya dapat tetap

prestasi yang akhir-akhir ini diterima di sekolah yang diinginkan. Praktik manipulasi perolehan nilai prestasi dengan pembuktian hanya berupa piagam dari tahun ke tahun membuat sekolah terus kecolongan, yang berakibat jangka panjang terhadap penurunan mutu sekolah tersebut karena penerimaan bibit-bibit yang tidak sesuai dengan syarat unggul yang telah ditetapkan. Hal ini tentu saja kemudian mengancam status SMP 3 sebagai jaminan sekolah unggulan dan mengancam standar output sekolah unggulan itu sendiri.

Oleh karena itu dari tahun ke tahun, untuk menangani masalah ini SMP 3 Semarang terus berusaha mencari jalan keluar agar tetap terus tidak kecolongan terhadap praktik manipulasi jalur nilai prestasi ini. Cara yang diterapkan oleh SMP 3 Semarang untuk mengatasi masalah ini dibuat berupa kebijakan sekolah berupa tes uji prestasi dan pemberian surat pernyataan . Kebijakan sekolah ini tertuang dalam Surat keputusan Kepala SMP 3 Semarang Nomor 800/792/2010 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta didik (PPD) kelas VII SMP 3 Semarang Tahun 2010/2011. Didalam surat keputusan terebut terdapat panitia yang khusus menangani kebijakan baru tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menjadi ingin tahu lebih dalam bagaimana praktik proses penerimaan calon peserta didik di SMP 3 Semarang, masalah-masalah yang terjadi di lapangan khususnya masalah nilai prestasi, dan kiat-kiat SMP 3 sebagai salah satu sekolah unggulan dalam mengatasi permasalahan penyaringan calon siswa didik melalui nilai prestasi yang selalu terjadi dari tahun ke tahun ini. Penulis juga ingin mengetahui bagaimana efektifitas dan dampak dari kebijakan penerimaan peserta didik yang

dibuat SMP 3 Semarang dalam mengatasi masalah manipulasi dalam penerimaan peserta didik. Inilah alasan penulis mengambil judul” Analisis Dampak Kebijakan Penerimaan Peserta Didik SMP Negeri 3 Kota Semarang (Kajian Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 420/3271 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Reguler di Kota Semarang 2010/2011)”

B. Tujuan Penelitian

- A. Untuk menjelaskan dan menganalisis dampak kebijakan penerimaan peserta didik yang dibuat oleh SMP Negeri 3 Semarang untuk mengatasi permasalahan nilai prestasi dalam proses penerimaan peserta didik reguler
- B. Untuk mengetahui dan menjelaskan aspek yang mendukung dan menghambat kebijakan penerimaan peserta didik yang dibuat oleh SMP Negeri 3 Semarang guna mengatasi permasalahan nilai prestasi dalam proses penerimaan peserta didik

C. Kerangka Teori

C.1 Kebijakan publik

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (dikutip dalam Islamy, 2007 : 18) adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Definisi kebijakan publik dari Thomas R. Dye tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta dan kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus

dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

James E. Anderson (dikutip dalam Islamy, 2007 : 19) mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Menurut Anderson, implikasi dari pengertian kebijakan publik tersebut adalah : (1) bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, (3) bahwa kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, (4) bahwa kebijakan publik itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, dan (5) bahwa kebijakan publik setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa.

Dari penjelasan kebijakan publik diatas selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau *action* dari pemerintah mengenai pencarian jalan keluar dari permasalahan yang tidak dapat lagi diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri dan terdapat paksaan kepada masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan. Secara analisis terdapat dua unsur yang terdapat dalam kebijakan yaitu tujuan kebijakan (*policy objectives*) dan cara atau peralatan untuk mencapai tujuan (*policy instrument*). Tujuan tertentu yang ingin dicapai merefleksikan nilai yang mendasari dan ingin diwujudkan. Hal ini mempengaruhi cara atau langkah-langkah yang dipilih atau instrumen untuk mencapainya

C.2 Analisis Kebijakan

Ada beberapa model analisis kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn (2003: 117-124) yaitu sebagai berikut :

1. Model Prospektif yaitu bentuk analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan 'sebelum' suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut sebagai model prediktif, karena seringkali melibatkan teknik-teknik peramalan (*forecasting*) untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dari suatu kebijakan yang akan diusulkan.
2. Model Retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan 'setelah' suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.
3. Model Integratif adalah model perpaduan antara kedua model di atas. Model ini sering disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik 'sebelum' maupun 'sesudah' suatu kebijakan dioperasikan. Model analisis kebijakan ini biasanya melibatkan teknik-teknik peramalan dan evaluasi secara terintegrasi.

C.3 Evaluasi Dampak Kebijakan

Dalam Studi Analisis Kebijakan Publik, analisis kebijakan publik sering juga disebut evaluasi kebijakan. Mengapa Evaluasi kebijakan dilakukan, karena pada dasarnya setiap kebijakan negara (*public policy*) mengandung resiko untuk mengalami kegagalan. Mengutip pendapat Hogwood dan Gunn (1986), selanjutnya menjelaskan bahwa penyebab dari kegagalan suatu

kebijakan (*policy failure*) dapat dibagi menjadi 2 katagori yaitu : (1) karena "non implementation (tidak terimplementasi, dan (2) karena "unsuccessful" (implementasi yang tidak berhasil. Tidak terimplementasikannya suatu kebijakan itu berarti bahwa kebijakan itu tidak dilaksanakan sesuai dengan di rencanakan. Implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi bila suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sudah sesuai rencana, dengan mengingat kondisi eksternal ternyata sangat tidak menguntungkan, maka kebijakan pendidikan tersebut tidak dapat berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang telah dikehendaki.

Pada studi evaluasi kebijakan telah dibedakan antara "policy impact / outcome dan policy output. "*Policy Impact / outcome*" adalah akibat-akibat dan konsekuensi konsekuensi yang ditimbulkan "Policy output" ialah dari apa-pa yang telah dihasilkan dengan adanya program proses perumusan kebijakan pemerintah (Islamy, 1986 : 114-115). Dampak kebijakan disini tidak lain adalah seluruh dari dampak pada kondisi "dunia -nyata" (the impact of a policy is all its effect on real – world conditions), untuk itu masih menurut (Dye, 1975: 367) yang termasuk dampak kebijakan adalah :

1. Dampak pada masalah public (pada kelompok sasaran) yg diharapkan atau tidak
2. Dampak pada kelompok diluar sasaran sering juga disebut eksternalitas / dampak melimpah(spillover effects)
3. Dampak sekarang dan yg akan datang
4. Dampak biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program
5. Dampak tak langsung (yg dikeluarkan publik akibat suatu kebijakan).

Dampak Kebijakan yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

Dampak internal , meliputi :

1. Ketersediaan data
2. Lembaga atau organisasi

Dampak Eksternal meliputi, meliputi :

1. Lingkungan
2. Masyarakat
3. Psikologis
4. Ekonomi

Pemilihan dampak kebijakan ini diambil dari beberapa teori dampak kebijakan dari Thomas dye , Langbein Weiss dan Finterbusch and motz.

D. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif bersifat deskriptif dimana hasil penelitian berupa kata-kata dan bukan angka , walaupun ada angka itu hanya sebagai penunjang dalam penjelasan hasil wawancara. Data hasil penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan panduan interview guide, catatan lapangan , dokumen , foto dan lain-lain. Lokus penelitian berada di SMP 3 Semarang dan Dinas pendidikan Kota Semarang. Peneliti mengumpulkan data menggunakan panduan wawancara dan software *recorder* yang terdapat pada *Handphone* sebagai alat bantu. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada informan, dan observasi langsung. Data sekunder diperoleh dari catatan, buku, dokumen, dan sumber lain. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.

E. Pembahasan

1. Analisis dampak kebijakan

Kebijakan penerimaan peserta didik SMP Negeri 3 Semarang berupa surat pernyataan merupakan salah satu kebijakan yang baru dan mulai diterapkan mulai tahun

2010/2011. Kebijakan ini dibuat oleh SMP 3 Negeri 3 Semarang guna mengatasi permasalahan dalam penerimaan peserta didik yang terjadi di SMP 3 Semarang yaitu masalah nilai prestasi berupa piagam “aspal”. Masalah ini terjadi karena keinginan dari para orang tua wali murid untuk menyekolahkan anaknya di salah satu SMP favorit yaitu SMP 3 Semarang. Keinginannya yang kuat dari para orang tua wali murid inilah yang membuat mereka melakukan segala cara agar anaknya walaupun dengan nilai rendah tetap dapat bersekolah di SMP 3 dengan memanfaatkan nilai prestasi palsu menggunakan piagam aspal , oleh karena itu dengan masalah yang terjadi disini peneliti merasa tertarik untuk menganalisis dampak kebijakan yang dibuat oleh SMP 3 Semarang dalam mengatasi masalah nilai prestasi. Evaluasi dampak adalah suatu identifikasi sistematis tentang efek positif dan negatif dan apa yang diharapkan dan tidak diharapkan, sehingga lembaga atau organisasi yang membuat kebijakan telah menentukan atau memetakan dampak apa saja yang terjadi , bisa dampak internal maupun dampak eksternal.

1. Dampak internal

Dampak internal merupakan pengaruh yang ditimbulkan yang berasal dari dalam suatu kebijakan yang telah ditentukan dan dibuat oleh organisasi atau lembaga , adapun dampak internal di sini meliputi

- a. Ketersediaan data – meliputi data-data yang akan digunakan untuk merumuskan kebijakan. Di dalam membuat kebijakan guna mengatasi permasalahan manipulasi nilai prestasi pihak SMP Negeri 3 Semarang hanya menggunakan data hasil PPD dimana terdapat data mengenai siswa yang terbukti melakukan kecurangan. Dari data yang sudah tersedia di atas

maka di sini panitia beserta kepala sekolah akan langsung mengadakan rapat guna membuat kebijakan. Dampak yang bisa dirasakan dengan adanya kebijakan ini bagi SMP 3 Semarang tentu dengan adanya penambahan dalam mekanisme penerimaan peserta didik di SMP 3 Semarang berupa tes uji prestasi dan pemberian surat pernyataan.

- b. Lembaga organisasi – dampak dari adanya kebijakan penerimaan peserta didik yang berpengaruh terhadap lembaga itu sendiri. Dampak kebijakan penerimaan peserta didik yang dibuat oleh SMP 3 Semarang adalah angka kecurangan pada tahun ajaran berikutnya semakin berkurang, tentu dengan penurunan angka kecurangan ini akan berdampak pada mutu SMP 3 Semarang sebagai salah satu sekolah unggulan tetap terjaga

2. Dampak eksternal - merupakan pengaruh yang ditimbulkan yang berasal dari luar suatu kebijakan yang telah ditentukan dan dibuat oleh organisasi atau lembaga , adapun dampak eksternal disini meliputi :

- a. Lingkungan – efek yang ditimbulkan dari adanya kebijakan penerimaan peserta didik yang dibuat SMP 3 Semarang terhadap lingkungan sekitar. Kebijakan ini bukan tidak mungkin dapat juga diterapkan oleh sekolah lain di kota Semarang agar dalam proses penerimaan peserta didik dapat berjalan lancar tanpa adanya kecurangan
- b. Masyarakat – tanggapan masyarakat terhadap kebijakan penerimaan peserta didik yang dibuat SMP 3. dampak adanya kebijakan ini bagi masyarakat adalah masyarakat jadi semakin paham mengenai mekanisme baru dalam penerimaan peserta didik di SMP 3 Semarang berupa penambahan tes uji prestasi dan pemberian surat pernyataan,

sehingga disini masyarakat tidak lagi melakukan kecurangan dalam penerimaan peserta didik

- c. Psikologis - dampak yang lebih bersifat personal seperti perasaan stress, emosi , depresi, yang dialami para calon peserta didik. Berdasarkan hasil di lapangan kebijakan penerimaan peserta didik yang dibuat oleh SMP 3 Semarang tentu akan membuat siswa yang terbukti melakukan kecurangan akan merasa tertekan secara psikologis karena tidak terbukti bisa menampilkan prestasi sesuai dengan piagam yang digunakannya.
- d. Ekonomi - dampak ekonomis disini lebih melihat adanya dana atau anggaran tertentu dalam membuat kebijakan penerimaan peserta didik yang dibuat SMP 3 Semarang berupa tes uji prestasi dan pemberian surat pernyataan. Berdasarkan hasil di lapangan kebijakan penerimaan peserta didik dalam hal pembuatannya SMP 3 tidak membutuhkan biaya atau anggaran khusus. Adapun biaya yang dikeluarkan hanya untuk pemberian *snack* dan alat kantor pada saat rapat

3. Aspek pendukung kebijakan (internal) – aspek pendukung kebijakan yang berasal dari dalam lembaga atau organisasi , meliputi :

1. Ketersediaan data - tersedianya data yang dapat mendukung kebijakan agar berjalan lebih efektif. Dengan adanya data hasil PPD ini tentu mendukung kebijakan penerimaan peserta didik yang dibuat oleh SMP 3 Semarang. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan praktek kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik dapat teratasi
2. Lembaga atau organisasi - berupa dukungan yang diberikan dari lembaga atau organisasi tersebut serta Dinas yang terkait dengan masalah ini, yaitu Dinas Pendidikan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa baik itu SMP 3 Semarang maupun dari Dinas Pendidikan sama – sama mendukung adanya kebijakan ini

4. **Aspek pendukung kebijakan (eksternal)** aspek pendukung kebijakan yang berasal dari luar lembaga atau organisasi , meliputi:

- a. Lingkungan - aspek dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi jalannya kebijakan penerimaan peserta didik yang dibuat oleh SMP 3 Semarang. Lingkungan sekitar SMP 3 Semarang baik itu masyarakat maupun sekolah lain mendukung adanya kebijakan ini , ini terbukti dengan tanggapan positif masyarakat di sekitar lingkungan SMP 3 Semarang
- b. Masyarakat – peran serta masyarakat dalam mendukung kebijakan penerimaan peserta didik yang dibuat SMP 3 Semarang. Adapun cara yang dapat dilakukan masyarakat guna mendukung kebijakan penerimaan peserta didik yang dibuat oleh SMP 3 Semarang adalah dengan tidak melakukan kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik
- c. Psikologis - adanya bentuk dukungan dari para orang tua wali atau calon murid dengan bentuk perasaan senang, emosi, depresi dll. Apabila calon murid tersebut terbukti melakukan kecurangan maka tentu hal ini akan berakibat pada mental calon siswa tersebut dan tentunya akan merasa sangat malu karena tidak bisa menunjukkan prestasi sesuai dengan piagam prestasinya , sehingga ini dapat juga menjadi pelajaran bagi orang tua wali dan calon siswa agar dikemudian hari tidak melakukan kecurangan.
- d. Ekonomi - adanya pengaruh dari faktor ekonomi yang mendukung kebijakan ini. Dalam praktek

pembuatann kebijakan tes uji dan prestasi tidak memerlukan anggaran khusus dalam pembuatannya. Hal ini terjadi karena adanya program sekolah gratis di mana semua pembiayaan telah didanai oleh BOS. Adapun biaya maupun honor kepada panitia penerimaan peserta didik sudah dihapuskan, sebagai gantinya panitia penerimaan peserta didik hanya mendapat pemberian snack serta penyediaan alat tulis kantor .

5. **Aspek penghambat kebijakan (internal)** - aspek yang menghambat kebijakan dari dalam lembaga atau organisasi , meliputi :

- a. Ketersediaan data – Data yang ada berupa hasil PPD dan data siswa yang melakukan kecurangan telah tersimpan rapi dan dapat digunakan untuk hasil evaluasi setiap ada penerimaan peserta didik
- b. Lembaga atau organisasi- dalam hal ini SMP 3 Semarang atau dinas pendidikan ada yang menolak kebijakan tes uji prestasi dan pemberian surat pernyataan yang dibuat oleh SMP 3 Semarang. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa hampir semua pihak di SMP 3 Semarang mendukung adanya kebijakan tes uji dan pemberian surat pernyataan ini karena kebijakan ini terbukti mampu menurunkan angka kecurangan dari tahun ke tahun , serta juga adanya imbauan dari dinas pendidikan kota semarang agar sekolah lain untuk bisa juga meniru apa yang dilakukan SMP 3 semarang dalam mengatasi kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik

6. **Aspek penghambat kebijakan (eksternal)** – aspek penghambat kebijakan yang berasal dari luar lembaga atau organisasi, meliputi

- a. Lingkungan - aspek dari lingkungan luar yang mungkin menghambat kebijakan penerimaan peserta didik

yang dibuat SMP 3 Semarang. Bentuk dukungan disini adalah baik itu masyarakat, sekolah dan juga dinas pendidikan menyambut positif adanya kebijakan ini. Dari dinas pendidikan juga menyarankan agar kebijakan ini dapat juga ditiru oleh sekolah lain.

- b. Masyarakat - adanya bentuk penolakan atau resistensi dari masyarakat terhadap kebijakan penerimaan peserta didik yang dibuat SMP 3 Semarang. Dari hasil penjelasan di atas salah satu hambatan yang terjadi adalah para orang tua wali murid yang banyak memberikan alasan apabila anaknya akan di tes nilai prestasi. Hal ini tentu saja orang tua wali murid tersebut diindikasikan menggunakan piagam prestasi palsu
- c. Psikologis - adanya perasaan tertekan dari para calon murid yang terbukti melakukan kecurangan. faktor psikologis merupakan salah satu penghambat kebijakan ini dimana, apabila calon murid terbukti melakukan kecurangan tentu akan menimbulkan perasaan tertekan dan malu dari murid tersebut. Hal inilah yang bisa menghambat proses penerimaan peserta didik karena siswa tersebut merasa malu, oleh karena itu diharapkan kesadaran dari para orang tua wali murid yang mendaftarkan anaknya dengan tidak melakukan praktek kecurangan.
- d. Ekonomi - aspek dari segi ekonomi yang dapat menghambat kebijakan ini. faktor ekonomi tidak menjadi hambatan dalam kebijakan penerimaan peserta didik yang dibuat SMP 3 Semarang. Hal ini terjadi, karena dalam praktek dan pembuatan kebijakan penerimaan peserta didik tidak memerlukan dana atau anggaran khusus, karena sudah ada program sekolah gratis dimana semua pembiayaan sudah masuk dalam dana BOS dari pemerintah. Sebagai

gantinya panitia hanya akan mendapat snack serta pemberian alat tulis kantor

F. Penutup

A. Kesimpulan

1. Dampak Positif

- a. Adanya kebijakan penerimaan peserta didik yang dibuat oleh SMP 3 Semarang terbukti berhasil dalam mengurangi praktek kecurangan berupa manipulasi piagam prestasi yang dilakukan oleh para orang tua wali murid
- b. Dengan adanya kebijakan penerimaan peserta didik reguler yang dibuat oleh SMP 3 Semarang dalam mengatasi masalah nilai prestasi maka SMP 3 Semarang sebagai salah satu sekolah unggulan tetap terjaga
- c. Adanya kebijakan penerimaan peserta didik yang dibuat oleh SMP 3 Semarang diharapkan dapat juga ditiru oleh sekolah lain untuk mencegah adanya kecurangan

2. Dampak negatif – adanya penambahan mekanisme dalam proses penerimaan peserta didik berupa tes uji prestasi dan pemberian surat pernyataan membuat jalannya proses penerimaan peserta didik semakin lama

B. Saran

1. Kebijakan penerimaan peserta didik yang dibuat oleh SMP 3 Semarang agar dipertahankan pada tahun ajaran yang akan datang. Hal ini perlu dilakukan agar praktik kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik tidak terjadi lagi
2. Saran yang terakhir adalah dalam hal ini disarankan untuk para orang tua wali murid untuk tidak menggunakan berbagai cara dan menghalalkan segala cara agar anaknya dapat diterima di sekolah yang diinginkan. Tanamkanlah sikap kejujuran kepada putra-putrinya agar dapat berlaku

jujur sejak dini dengan tidak melakukan kecurangan.

Islamy, M. Irfan, 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi Kedua*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press..

Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. ed.rev, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Wibawa, Samodra, 1992, *Kebijakan Publik : Proses dan Analisis*. Jakarta : Intermedia.